



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 23
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 19 September 2023
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Membicarakan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/ Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dahliya Bahnan, S.H., M.H./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 23 (dua puluh tiga) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri C. Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) D. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) E. Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda membicarakan persiapan

pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, hari Selasa, 19 September 2023, dibuka pukul 14.47 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, M.Hum., Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda membicarakan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, sebagai berikut:

1. Beberapa hal yang disampaikan **Dirjen Polpum Kemendagri**, sebagai berikut:
 - a. Korelasi antara rencana pembangunan di tingkat nasional dengan di daerah **harus sejalan** (memutuskan masa transisi).
 - b. Per 1 Januari 2025 sudah tidak ada lagi Kepala Daerah Definitif apabila pelaksanaan Pilkada tetap di bulan November 2024.
2. Beberapa hal yang disampaikan **APPSI**, sebagai berikut:

Wakil Ketua APPSI (Gubernur Jambi)

 - a. Secara umum daerah siap untuk melaksanakan Pemilu Serentak 2024.
 - b. Kepastian jadwal untuk Pilkada Serentak Tahun 2024 perlu segera diputuskan.
 - c. Sebaiknya pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 dimajukan waktunya dengan mempertimbangkan aspek kesiapan Pemerintah Daerah dan Penyelenggara, *euphoria* Masyarakat, dan pengamanan.

APPSI (Gubernur Bengkulu)

 - a. Perlu diperhatikan akhir masa jabatan Kepala Daerah dan kemungkinan terjadinya sengketa sehingga dapat menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum/jabatan.
 - b. Penguatan terhadap dasar hukum pelaksanaan.
 - c. Masalah kuota Perempuan harus sesuai kaidah ilmu pengetahuan (terkait pembulatan).
 - d. Kuota perempuan juga sebaiknya diterapkan pada komposisi komisioner penyelenggara Pemilu.
3. Beberapa hal yang disampaikan **APKASI (Bupati Dharmasraya)**, sebagai berikut:
 - a. Masa kampanye jangan terlalu Panjang.
 - b. Pelantikan sebaiknya diseragamkan waktunya (yang bersengketa maupun yang tidak).
 - c. Daerah siap untuk melaksanakan Pemilu maupun Pilkada 2024.

4. Beberapa hal yang disampaikan **ADKASI (Papua Barat)**, sebagai berikut:
 - a. Anggaran pelaksanaan Pilkada jangan sepenuhnya dibebankan ke daerah.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Dirjen OTDA Kementerian Dalam Negeri, M.Hum., Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), dengan agenda membicarakan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024, sebagai berikut:

1. Tanggapan Anggota Komisi II DPR RI, sebagai berikut:
 - a. Visi misi Kepala Daerah dalam konteks Pembangunan daerah harus sejalan dengan visi misi dari Presiden terpilih.
 - b. Partai Politik akan keberatan untuk mengikuti keputusan MA terkait perhitungan untuk kuota calon Perempuan karena waktu yang sangat pendek untuk merubah komposisi dari DCS ke DCT.
 - c. Anggaran Pilkada harus benar-benar menjadi prioritas untuk dialokasikan dalam APBD di masing-masing daerah.
 - d. Pemilihan Serentak itu harus dimaknai juga dengan pelantikan serentak.
2. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan dari Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI). Selanjutnya akan dibahas pada Rapat Intern dan/atau Rapat dengan Pemerintah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.36 WIB.

Jakarta, 19 September 2023

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIATANDJUNG
A-270